

Duit Freeport Sarat Gratifikasi

■ KPK Tunggu Hasil Audit BPK ■ Polri Siap Berikan Klarifikasi

” Pemberian uang dari Freeport ke Polri sarat dengan potensi gratifikasi. Namun, KPK belum mengusut. ”

BUSYRO MUQODDAS
Ketua KPK



TRIBUN/DOK



TRIBUN/DOK

” Kita lihat dulu, uang pengamanan dari siapa? Kalau bukan keuangan negara, bukan kewenangan BPK ”

HADI POERNOMO
Ketua BPK

JAKARTA, TRIBUN - Polri telah mengakui ada dana yang mengalir dari PT Freeport Indonesia ke korps Bhayangkara untuk keperluan pengamanan perusahaan tambang raksasa AS yang berlokasi di Papua tersebut.

Ketua KPK Busyro Muqoddas menilai pemberian duit tersebut sarat dengan potensi gratifikasi. “Ya, ada potensi,” kata Busyro di Kantor KPK, Jakarta, Senin (31/10).

Namun demikian, Busyro

mengatakan, pihaknya belum akan mengusut lebih jauh dugaan tersebut. “Belum sampai ke sana (pengusutan),” katanya. “Untuk mengusut, KPK memerlukan hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Jumat (28/10), mengakui bahwa Polri menerima bantuan dari PT Freeport sebesar Rp 1,4 juta bagi setiap personel Polri yang melakukan pengamanan aset-aset perusahaan asal Amerika itu.

Timur mengakui, uang dari PT Freeport itu tidak melalui kementerian, tetapi langsung diberikan kepada anggota polisi di lapangan.

Diketahui, Freeport-McMoran Copper & Gold, yang merupakan induk dari PT Freeport Indonesia menganggarkan “uang keamanan” untuk operasionalnya di sejumlah negara.

Di Indonesia, uang keama-

■ Bersambung ke Hal 7

Duit Freeport Sarat Gratifikasi

Sambungan Hal. 1

nan Freeport mencapai 14 juta dolar AS atau sekitar Rp 126 miliar, terbesar setelah setoran keamanan ke AS yang hanya 81 juta dolar AS.

Juru Bicara KPK, Johan Budi, yang dihubungi terpisah, mengatakan, KPK harus menelusuri terlebih dahulu apakah dana pemberian Freeport kepada aparat polisi masuk dalam kontrak perjanjian antara perusahaan tersebut dengan Pemprov Papua.

Kalaupun misalnya pemberian dana Freeport itu resmi, tentu ada aturannya. Yaitu, harus dilakukan audit terlebih dahulu. "Lembaga negara yang bisa mengaudit adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, Red)," kata Johan.

Artinya, KPK tidak bisa bisa langsung melakukan pemeriksaan?

"Jadi, intinya harus ditelusuri dulu dari kontrak. Kalau memang disitu tertera (ada perjanjian pemberian dana), itu bukan merupakan suap atau gratifikasi," jawab Johan.

KPK juga, terang Johan menambahkan, belum berkoordinasi dengan BPK. Karena lembaga antikorupsi itu baru mendengar kabar polisi mendapat dana dari perusahaan asal Amerika Serikat itu dari media.

Apakah KPK sudah dikonfirmasi ke Kepolisian? "Dana-dana ini kan terkait proyek perjanjian. Yang akan kita lakukan penelusuran lebih lanjut setelah hasil audit yang dilakukan lembaga negara. Baru setelah itu kita akan lakukan (penyelidikan) lebih lanjut," beber mantan wartawan ini.

Minta BPK Audit

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, menilai setoran Freeport ke Polri bukan hal baru. Setoran tersebut sudah terjadi sejak dahulu kala.

"Sebenarnya ini bukan hal baru, karena praktik seperti sudah lama ada," ujar Pramono kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin.

Meski demikian, saat ini sudah era keterbukaan. Sehingga hal itu perlu diaudit. DPR sendiri meminta BPK untuk melakukan audit terhadap setoran sebesar 14 juta dolar AS itu.

"Harusnya BPK melakukan audit terhadap hal itu. Dan kalau ada temuan dugaan korupsi bisa ditindaklanjuti ke KPK," terang politisi PDIP ini.

Bagaimana tanggapan BPK? Lembaga ini menyatakan akan mengecek dulu benar tidaknya ada uang keamanan dari Freeport ke Polri senilai 14 juta dolar AS. BPK memilih berhati-hati dalam menyikapi persoalan tersebut.

"Kita lihat dulu, kita cek uang pengamanan dari siapa? Kalau uang negara, kita cek. Kalau bukan keuangan negara, bukan kewenangan BPK," kata Ketua BPK, Hadi Poernomo, di Samarinda, Senin.

Hadi menegaskan, sejauh ini BPK belum bisa memberikan penilaian wajar tidaknya ada dana pengamanan yang disebut-sebut bersumber dari perusahaan tambang Freeport yang beroperasi di Papua.

"Dalam audit, kita tidak hapal. Kita mengaudit 2.500 entitas termasuk Polri, saya tidak hapal satu persatu. Kan rekeningnya banyak, secara detilnya tim pemeriksa yang tahu," sebut Hadi.

Ditanya wartawan, apakah BPK siap memeriksa keuangan Polri, terkait dana pengamanan tersebut benar tidaknya termasuk keuangan negara, Hadi belum bisa memastikan.

"Oh, belum tentu, kita lihat keadaan yang sebenarnya. Makanya, kita harus teliti dulu

uang negara atau bukan," tambah Hadi.

Mabes Polri pun siap membeberkan penerimaan dana dari Freeport. Polri siap menemui KPK dan DPR agar semuanya menjadi jelas dan transparan.

"Enggak ada masalah, kita siap klarifikasi dan menjelaskan semuanya. Tapi, soal teknis nanti kita sampaikan," jelas Kadiv Humas Polri, Irlen Pol Saut Usman, di Mabes Polri, Jakarta.

Polri juga siap bila penerimaan dana itu diaudit. "Siap transparan, siap klarifikasi dan mempertanggungjawabkan jika ditemukan penyimpangan," terangnya.

Saut menjelaskan, pihak Mabes Polri akan melakukan klarifikasi internal terkait penerimaan dana ini karena peristiwa setoran dana itu terjadi di Papua.

Mogok Berlanjut

Sementara itu, aksi mogok kerja karyawan Freeport masih terus berlangsung hingga Senin kemarin. Mereka bergeming dengan peringatan dari Polres Mimika yang meminta karyawan mengosongkan CP 1 dan dua akses masuk lainnya ke areal Freeport sebelum Rabu (2/11).

Ribuan karyawan masih mogok kerja dan menutup akses masuk ke areal Freeport.

Ketua Bidang Organisasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) PT Freeport Indonesia, Virgo H Solossa, di Timika, Senin, mengatakan, karyawan menolak membuka akses masuk ke areal Freeport sebelum ada itikad baik dari pihak manajemen untuk memperbaiki kesejahteraan karyawan.

Karena itu, Virgo berharap pihak kepolisian bertindak bijaksana dalam menyikapi masalah yang ada. Biarkan perundingan antara pihak karya-

wan dan manajemen yang sudah berjalan baik sejak sepekan terakhir, dituntaskan, tambahnya.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Ramdhani Sirait yang dihubungi terpisah mendukung peringatan kepolisian terhadap aksi karyawan.

"Manajemen dari awal telah meminta agar tidak ada blokade akses jalan karena blokade merupakan pelanggaran aksi mogok damai yang dijanjikan oleh SPSI ketika memulai mogok," tambahnya.

Sebanyak empat kendaraan lapis baja, sebuah *backhoe loader* dan *bulldozer* digerakkan aparat ke arah mile 27 tempat buruh Freeport berunjukrasa.

Koordinator Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar, yang baru pulang dari Timika mengabarkan, Kapolres Mimika, AKBP Deny Edward Siregar, mengultimatum akan membongkar paksa kamp buruh Freeport di Mile 28 dan bendungan serta gorong-gorong.

"Para buruh diminta bersiaga. Mereka mogok kerja sesuai ketentuan. Ada upaya mengaitkan mogok kerja mereka dengan separatisme dan kekerasan," kata Haris.

Kapolres Deny Edward Siregar menyatakan, tindakan SPSI sudah melanggar pidana dan UU nomor 13 Tahun 2003. Lokasi gorong-gorong adalah lokasi terbunuhnya Petrus Ayamseba tanggal 10 Oktober lalu. Dia tertembak peluru tajam aparat.

SPSI menuntut kenaikan upah dari 7,5 dolar AS per jam menjadi 33 dolar AS per jam untuk pegawai rendah level 1-3. Mereka mogok kerja sejak 15 September 2011. (tribunnews/ade/coz/aco/nic)